

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIUSI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI GORONTALO

THE INFLUENCE OF LOCAL TAXES AND LEVIES FOR LOCAL FINANCIAL INDEPENDENCE IN THE DISTRICTS / CITIES IN GORONTALO PROVINCE

Fadly Nggilu¹, Harijanto Sabijono², Victorina Tirayoh³

^{1,2,3}*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

Universitas Sam Ratulangi Manado 95115, Indonesia

Email : fadly.nggilu@gmail.com

ABSTRAK

Kemandirian daerah dalam otonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi gorontalo. Sampel yang digunakan sebanyak 6 kabupaten/kota setiap tahunnya dari tahun 2009 – 2014. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik dengan menentukan derajat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) pada uji t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai signifikansi 0,000 dan untuk variabel Retribusi Daerah juga berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai signifikansi 0,006. Kemudian secara simultan variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dimana variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mempunyai kontribusi sebesar 76% terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan sisanya sebesar 34% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah

ABSTRACT

Local independence in autonomy can be known by how much ability the financial resources to be able to develop their regions. The purpose of this study was to determine the effect of local taxes and levies to local financial independence at the district / city in the province of Gorontalo. Samples used as much as 6 districts / cities every year from 2009 to 2014. The analytical method used in this research is the method of multiple linear regression analysis using classical assumption test to determine the degree of confidence of 95% ($\alpha = 0.05$) in the T test. Results from this study showed that in partial Regional Tax significant influence positively to the Regional Financial Independence with significant value for the variable of 0.000 and Levies also a significant positive effect Regional Financial Independence with significant value 0.006. Then simultaneously variable Local Taxes and Levies positive effect on local financial independence. Variables Local Taxes and Levies only has a contribution of 76% of the Regional Financial Independence variable, while the remaining 34% was contributed by other variables that are not observed in this study.

Keyword : Local Tax, Local Retribution, Regional Financial Independence

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sumber – sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur pendapatan asli daerah yang utama.

Di era otonomi ini diharapkan daerah menjadi mandiri di dalam pengelolaan kewenangannya yang ditandai dengan menguatnya kapasitas fiskal atau PAD suatu daerah. Sementara itu untuk beberapa hal yang mungkin masih kekurangan dana, daerah masih diberi bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Namun tujuan awal pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan Kapasitas Fiskal Daerah yang kuat dalam mendukung terciptanya kemandirian daerah.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh :

1. Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
2. Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

Tinjauan Pustaka

Konsep Akuntansi

Menurut Weygandt, Kimmel, Kieso (2011) akuntansi adalah system informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi untuk pengguna yang tertarik.

Akunansi Perpajakan

Akuntansi pajak (*tax accounting*), Waluyo (2011) menjelaskan bahwa dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang.

Akuntansi perpajakan adalah seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terhutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak.

Sumber Pendapatan Daerah

Halim (2012) menyebutkan bahwa Sumber pendapatan daerah dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Transfer
3. Lain – lain pendapatan yang sah.

Pajak Daerah

Mardiasmo (2013) Menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Retribusi Daerah

Siahaan (2010) menyatakan bahwa Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Kemandirian Keuangan Daerah

Mahardika (2014) Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, dan seberapa efektifnya target perencanaan terhadap realisasinya.

Landasan Empirik

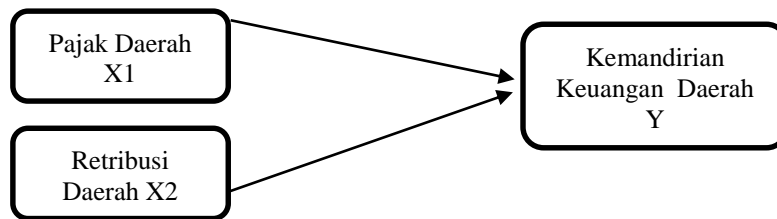
Sembel (2012) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kab.Minahasa Selatan. Untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah.

Alfarisi (2015) dengan judul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 1.Pengaruh pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. 2.Pengaruh retribusi daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. 3.

Pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.

Meiliana (2014) dengan judul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung. Untuk mengetahui apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung baik secara parsial maupun simultan.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber : Konsep diolah, 2016

Hipotesis

Hypothesis penelitian ini adalah :

1. Diduga Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2009 – 2014.
2. Diduga Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2009 – 2014.
3. Diduga Retribusi Daerah secara pasrial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2009 – 2014.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil peneliti adalah penelitian kuantitatif. Sugiyono (2012:13) mengemukakan penelitian kuantitatif, sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen (sebab) dan variabel dependen (akibat). Dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh independen terhadap variabel dependen.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang dipilih yaitu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Pemilihan tempat ini sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah ini tepat menjadi objek untuk penelitian karena berhubungan dengan judul yang diangkat yaitu mengenai Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Dengan permasalahan yang diangkat dari penelitian ini, maka waktu dilaksanakan penelitian ini pada bulan Mei sampai Juni 2016.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah :

1. Pengambilan data sesuai permasalahan yang di angkat.
2. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait, serta dokumentasi berupa pengambilan data-data di Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo untuk mengetahui berapa realisasi anggaran untuk penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan juga pendapatan asli daerah serta pendapatan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo pada tahun 2009 – 2014.
3. Mengelola data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data melalui SPSS 22.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data yang umum digunakan dalam penelitian berupa data kuantitatif dan kualitatif:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala angka, cara penyajian data secara deskriptif (Kuncoro 2014:145).

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam skala angka, data-data yang disajikan dalam bentuk angka-angka (Kuncoro 2014:145).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif. Yakni data Realisasi APBD di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 – 2014 yang didapatkan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data original.
2. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo dan situs (www.djpk.depkeu.go.id).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan semua data sekunder dimana peneliti berusaha untuk melakukan penelitian pada instansi terkait Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. Data yang diperoleh yaitu realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupate/Kota di Provinsi untuk tahun 2009-2014 dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Definisi dan Pengukuran Variabel

1. Pajak Daerah

$$\text{Rasio Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\frac{\text{Realisasi Total}}{\text{Pendapatan daerah}}} \times 100\%$$

2. Retribusi Daerah

$$\text{Rasio Retribusi Daerah} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\frac{\text{Realisasi Total}}{\text{Pendapatan daerah}}} \times 100\%$$

3. Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\frac{\text{Realisasi Total}}{\text{Pendapatan daerah}}} \times 100\%$$

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Penelitian Uji Asumsi Klasik ini digunakan untuk mendapatkan hasil regresi linier yang baik. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik menggunakan Software SPSS 22 for windows dan menghasilkan output sebagai berikut:

Hasil Uji Asumsi Klasik Multikolineritas

Tabel 1. Uji Multikolineritas

Model	Coefficients ^a		
		Tolerance	Collinearity Statistics VIF
1	Pajak Daerah	.939	1.065
	Retribusi Daerah	.939	1.065

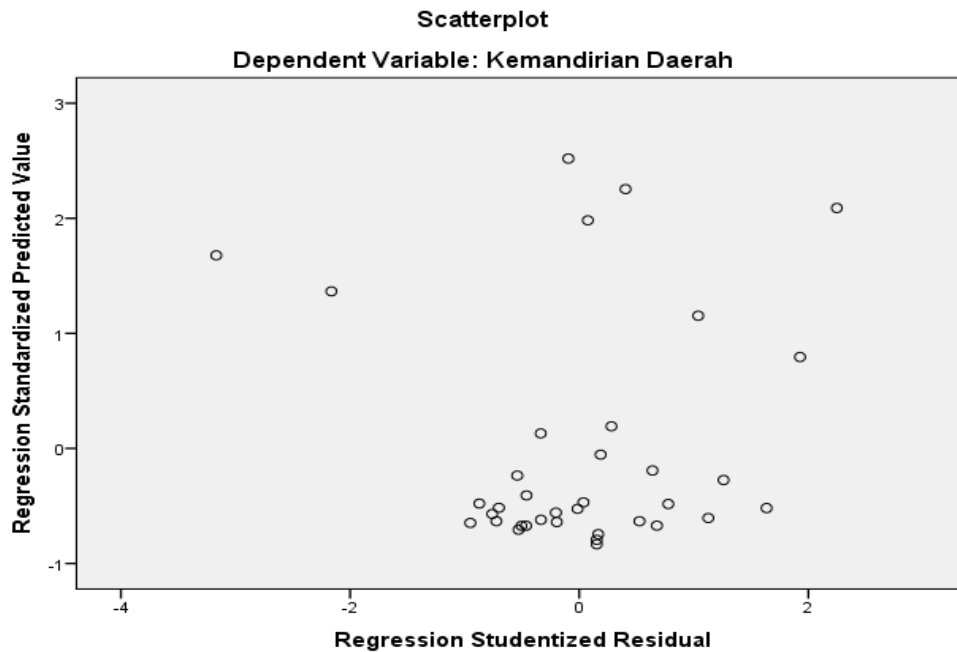
a. Dependent Variable: Kemandirian Daerah

Sumber: Data Olahan SPSS 22, 2016

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat dilihat pada output coefficient model, dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai VIF < 10. Hasil perhitungan menghasilkan nilai VIF untuk Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2) berada pada angka di bawah 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi tersebut dan data ini dapat digunakan untuk dijadikan estimasi.

Hasil Uji Asumsi Klasik Heterokedastisitas

Gambar 1. Uji Heterokedastisitas



Gambar diatas grafik Scatterplot yang ditampilkan untuk uji heteroskedastisitas menampakkan titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak ada pola yang jelas terbentuk serta dalam penyebaran titik-titik tersebut menyebar dibawah dan diatas angka nol (0) pada sumbu Y. Hal tersebut mengidentifikasi tidak terjadinya heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memperdiksi variabel Kemandirian Keuangan Daerah (Y).

Hasil Uji Asumsi Klasik Autokorelasi

Tabel 2. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.873 ^a	.761	.747	1.94624	1.948

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Kemandirian Daerah

Sumber Data Olahan SPSS 22, 2016

Uji Autokorelasi menggunakan nilai Durbin-watson (DW). Secara umum dengan cepat diambil patokan dari :

Jika $d < dL$ maka, terdapat autokorelasi positif

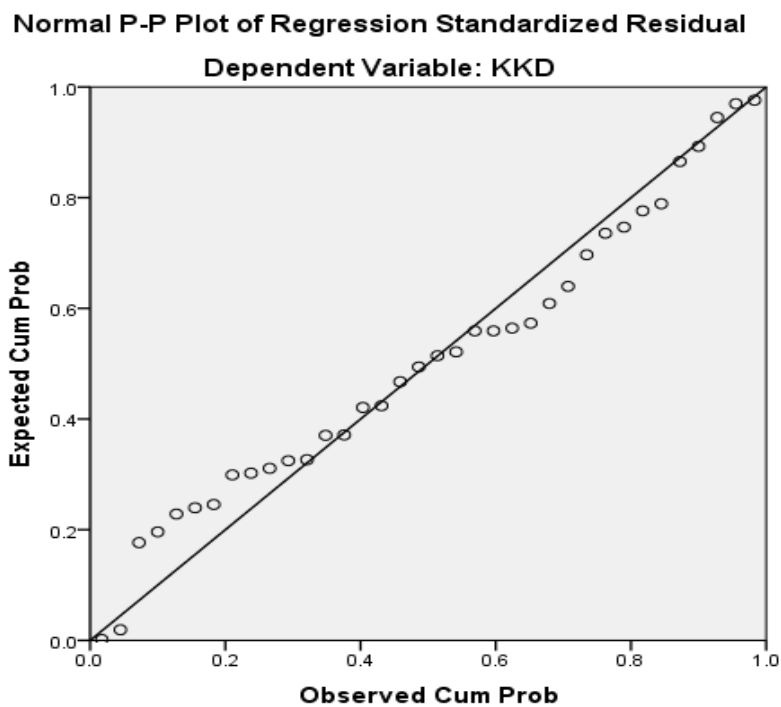
Jika $d > dU$ maka, tidak terdapat autokorelasi

Jika $dL < d < dU$ maka, pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.

Hasil uji autokorelasi di atas menunjukkan nilai statistik Durbin Watson (DW) sebesar 1.948. Nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 0,05 (5%), jumlah amatan 36 (n) dan jumlah variabel independen 2 ($k = 2$). Dari tabel Durbin Watson didapat nilai batas atas (du) 1,5872, nilai batas bawah (dl) 1,3537. Oleh karena itu, nilai DW 1.948 lebih besar dari du sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas

Gambar 2 Uji Asumsi Klasik Normalitas



Sumber : Data Olahan SPSS 22, 2016

Dalam penelitian data yang digunakan harus memenuhi syarat yaitu data harus terdistribusi normal. Untuk itu perlu dilakukan Uji Asumsi Klasik Normalitas data. Dalam pengujian ini dapat dilakukan dengan cara melihat Normal Plot yaitu apabila data berada disepanjang garis diagonal dan bergerak searah dengan garis diagonal, maka dapat data dapat dikatakan terdistribusi normal. Dari cara tersebut pada Gambar 4.1, untuk normal plot untuk ketiga variabel dapat dilihat data berada disepanjang garis diagonal dan bergerak searah dengan garis diagonal. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas.

Analisis Linier Berganda

Tabel 3 Analisis Regresi

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	1.965	.524		3.753	.001		
	Pajak Daerah	2.594	.295	.772	8.795	.000	.939	1.065
	Retribusi Daerah	.726	.245	.260	2.960	.006	.939	1.065

a. Dependent Variable: Kemandirian Daerah

Sumber : Data Olahan SPSS 22. 2016

$$Y = 1,965 + 2,594 X_1 + 0,726 X_2 + e$$

Adapun Interpretasi dari persamaan di atas adalah:

1. Konstanta sebesar 1.965 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 1.965.
2. Koefisien Pajak Daerah 2,594 menunjukkan bahwa rasio Pajak Daerah (X1) berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y). Artinya jika Pajak Daerah ditingkatkan maka akan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 2,594.
3. Koefisien Retribusi Daerah 0,726 menunjukan bahwa Rasio Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y). Artinya jika Retribusi Daerah ditingkatkan maka akan meningkatkan tingkat kemandirian sebesar 0,726.
4. standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Secara Parsial (Uji – t)

Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji – t)

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	1.965	.524		3.753	.001		
	Pajak Daerah	2.594	.295	.772	8.795	.000	.939	1.065
	Retribusi Daerah	.726	.245	.260	2.960	.006	.939	1.065

a. Dependent Variable: Kemandirian Daerah

Sumber: Data Olahan SPSS 22, 2016

Pada penelitian ini maka t tabel atau $df = n - k$ dimana $n = 36$ dan $k = 3$. Pada penelitian ini $df = 36 - 3 = 34$ menggunakan α 5% atau 0,05 didapatkan t tabel adalah 1.692.

Berdasarkan Tabel 4.9 maka Uji T (Secara parsial) yang di dapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah (X1) mempunyai nilai signifikansi 0,000 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05, sedangkan nilai t hitung $8,795 > t$ tabel 1,692. Berdasarkan kedua nilai tersebut disimpulkan bahwa H_a diterima (H_0 ditolak) atau dijelaskan bahwa variabel Pajak Daerah (X1) secara parsial berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian (Y).

- Retribusi Daerah (X2) mempunyai nilai signifikansi 0,006 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05, sedangkan nilai t hitung $2,960 > t$ tabel 2,032. Berdasarkan kedua nilai tersebut disimpulkan bahwa H_a diterima (H_0 ditolak) atau dijelaskan bahwa variabel Retribusi Daerah (X2) secara parsial berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian (Y).

**Hasil Uji Secara Simultan (Uji – F)
Uji F (Secara Simultan)**

**Tabel 5 Hasil Uji Hipotesis Uji Statistik F
ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	399.037	2	199.518	52.673	.000 ^b
Residual	124.999	33	3.788		
Total	524.035	35			

a. Dependent Variable: Kemandirian Daerah

b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber: Data Olahan SPSS 22, 2016

Untuk melihat F tabel dalam pengujian hipotesis pada model regresi, perlu menentukan derajat bebas atau degree of freedom (df) atau dikenal dengan df2 dan juga dalam F tabel disimbolkan dengan N2. Hal ini ditentukan dengan rumus:

$$df1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$$

$$df2 = n - k = 36 - 3 = 33$$

Maka F Tabel untuk α 5% adalah 3.285

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 52.673 dengan tingkat signifikansi 0,000, jauh lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi tingkat kemandirian keuangan daerah. Juga dapat dinyatakan bahwa F hitung $> F$ tabel dimana $52,673 > 3.285$. Dengan kata lain H_a diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, yang artinya, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Hasil Uji Koefisien Determinan (R2)

**Tabel 6 Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.873 ^a	.761	.747	1.94624

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Kemandirian Daerah

Sumber : Data Olahan SPSS 22, 2016

Pada Model Summary^b di atas, angka R sebesar 0,873 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara Kemandirian Daerah (Y) dengan Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) cukup kuat yaitu sebesar 87,3%. Dikatakan cukup kuat karena angka tersebut berada diatas 0,5 (50%). Sedangkan nilai R *square* atau koefisien determinasi adalah 0,761. Nilai ini mengindikasikan bahwa 76% variasi atau perubahan dalam Kemandirian Daerah dapat

dijelaskan oleh variasi variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan sisanya sebesar 34% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan Hasil Uji T pada tabel 4.9, maka variabel Pajak Daerah (X1) mempunyai nilai signifikansi 0,000 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05, sedangkan nilai t hitung 8,795 > t tabel 1,692. Berdasarkan kedua nilai tersebut disimpulkan bahwa H_0 diterima (H_0 ditolak) atau dijelaskan bahwa variabel Pajak Daerah (X1) secara parsial berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y).

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan Hasil Uji T pada tabel 4.9, maka variabel Retribusi Daerah (X2) mempunyai nilai signifikansi 0,006 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05, sedangkan nilai t hitung 2,960 > t tabel 1,692. Berdasarkan kedua nilai tersebut disimpulkan bahwa H_0 diterima (H_0 ditolak) atau dijelaskan bahwa variabel Retribusi Daerah (X2) secara parsial berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y).

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan oleh Uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 52.673 dengan tingkat signifikansi 0,000, jauh lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi tingkat kemandirian keuangan daerah. Juga dapat dinyatakan bahwa F hitung > F tabel dimana 52,673 > 3.285. Dengan kata lain H_0 diterima (H_0 ditolak), yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, yang artinya, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan oleh angka R Square atau koefisien determinan hasil yang di dapat adalah 0,761. Angka ini menjelaskan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah dipengaruhi oleh Faktor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 76,1% sedangkan sisanya yaitu 23,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
2. Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif juga signifikan terhadap Kemandirian Keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo
3. Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh positif juga signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

Saran

1. Mengingat pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo maka untuk pemanfaatan anggaran agar bisa dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
2. Untuk pemerintahan kabupaen/kota di Provinsi Gorontalo agar mempertahankan tingkat Pendapatan Daerah jika perlu ditingkatkan terutama di bidang Retribusi Daerah.
3. Untuk penelitian selanjutnya agar bisa menjadi acuan untuk dijadikan referensi juga disarankan agar mengambil sampel di luar kabupaten/kota di provinsi gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA**Jurnal**

- [1] Mahardika I Gusti Ngurah Suryaadi, 2014. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia ISSN: 2302-8912 Vol 3, No 3 (2014)
- [2] Meiliana , 2014. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung*. Master thesis, Universitas Lampung.
- [3] Salman Alfarisi. 2015 *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- [4] Sembel Antoneta. 2012. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol 1, No 3

Buku

- [1] Halim Abdul & Syam Kusufi.(2012). *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Edisi ke 4 Jakarta. Salemba Empat
- [2] Kuncoro, Mudrajat, 2014. *Metode Riset Untuk Bisnis, dan Ekonomi*. Edisi 4 Erlangga. Jakarta.
- [3] Mardiasmo 2013 *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI.Yogyakarta
- [4] Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- [5] Sugiyono 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- [6] Waluyo 2011. *Perpajakan Indonesia* Edisi 10, buku 1
- [7] Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2011). *Financial Accounting*. (IFRS edition). The United State of America: John Wiley and Sons, Inc.